

# UPAYA DINAS SOSIAL DALAM PEMBINAAN ANAK JALANAN DI KABUPATEN LABUHANBATU PROVINSI SUMATERA UTARA

Immanuel Hamonangan Marpaung

NPP. 30.0102

*Asdaf Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara*

*Program Studi: Politik Indonesia Terapan*

Email: [immanuelmarpaung54321@gmail.com](mailto:immanuelmarpaung54321@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Ir. Tjut Syiariah, MM.

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** *Indonesia, as one of the countries with the fourth most populous population in the world, faces various social and economic problems that affect the development process. One impact is an increase in the number of street children, which generally causes significant social problems. Even though there are coaching efforts from the Social Service, the challenges in overcoming this problem in Labuhan Batu Regency remain large. Purpose:* The aim of this research is to examine and find out how efforts are made, find out the inhibiting factors, and overcome the inhibiting factors of the Labuhan Batu Regency Social Service in providing guidance to street children. **Method:** *This research employs a qualitative approach with an inductive method. The data collection techniques include interviews, observations, and documentation. Result:* The results of this research indicate that the implementation of coaching activities carried out by the Labuhanbatu Regency Social Service has not been running and is being carried out well and optimally. Limited budget and a very minimal number of social workers are the main factors. **Conclusion:** The author concludes that the Social Service carries out direct data collection and collaborates with Satpol PP to monitor street children as a preventive measure. In the preservation dimension, they collaborate with orphanage foundations for the mental and physical rehabilitation of street children. Curative efforts involve training such as sewing and computer courses. For the adaptation dimension, the Social Service and Satpol-PP carry out raid patrols to maintain public order. The author identifies several factors inhibiting the empowerment of street children, such as limited human resources, budget allocation, coordination, as well as economics and parental participation. To overcome these obstacles, the Social Service is improving the quality of human resources, optimizing the budget, strengthening coordination, and providing outreach to parents. The author suggests that the Labuhanbatu Regency Government evaluate and increase the budget, encourage department heads to be more active, and socialize the importance of protecting the rights of street children.

**Keywords:** *Development, Efforts, Street Children, Social Services*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Negara Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terpadat keempat di dunia, menghadapi berbagai masalah sosial dan ekonomi yang mempengaruhi proses pembangunan. Salah satu dampaknya adalah peningkatan jumlah anak jalanan, yang umumnya menimbulkan masalah sosial yang signifikan. Meskipun terdapat upaya-upaya pembinaan dari Dinas Sosial, tantangan dalam mengatasi masalah ini di Kabupaten Labuhan Batu tetap besar. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji serta mengetahui bagaimana upaya, mengetahui faktor penghambat, dan mengatasi faktor penghambat Dinas Sosial Kabupaten Labuhan Batu dalam memberikan pembinaan kepada anak jalanan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan wawancara, observasi, kemudian dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu belum berjalan dan terselenggara dengan baik dan maksimal. Ketebatasan anggaran dan jumlah pekerja sosial yang sangat minim adalah faktor utamanya. **Kesimpulan:** Penulis menyimpulkan bahwa Dinas Sosial melakukan pendataan langsung dan bekerja sama dengan Satpol PP untuk pemantauan anak jalanan sebagai upaya preventif. Dalam dimensi preservatif, mereka bekerja sama dengan yayasan panti asuhan untuk rehabilitasi mental dan fisik anak jalanan. Upaya kuratif melibatkan pelatihan seperti kursus menjahit dan komputer. Untuk dimensi adaptasi, Dinas Sosial dan Satpol-PP melaksanakan patroli razia untuk menjaga ketertiban umum. Penulis mengidentifikasi beberapa faktor penghambat pemberdayaan anak jalanan, seperti terbatasnya sumber daya manusia, alokasi anggaran, koordinasi, serta ekonomi dan partisipasi orang tua. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Dinas Sosial meningkatkan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi anggaran, penguatan koordinasi, serta sosialisasi kepada orang tua. Penulis menyarankan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk mengevaluasi dan meningkatkan anggaran, mendorong kepala dinas lebih aktif, serta mensosialisasikan pentingnya melindungi hak-hak anak jalanan.

**Kata kunci:** *Anak Jalanan, Dinas Sosial, Pembinaan, Upaya*

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terpadat ke empat di dunia dengan jumlah dua ratus tujuh puluh lima jiwa penduduk. Dengan besarnya angka penduduk ini, tentunya menimbulkan berbagai macam persoalan baik dibidang perekonomian maupun sosial yang pastinya akan mempersulit proses perkembangan dan pembangunan negara (Najidah & Lestari, 2019). Salah satu permasalahan yang dihadapi dibidang sosial terutama akibat jumlah penduduk di Indonesia hal ini berdampak buruk pada peningkatan jumlah angka anak-anak jalanan, dimana hal ini umumnya dapat menimbulkan permasalahan sosial di tengah kehidupan bermasyarakat (Adriani, 2023).

Kemiskinan menjadi salah satu latar belakang penyebab hadirnya anak jalanan di kota-kota. Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarganya (Lase et al., 2023). Kemudian faktor pendidikan menjadi salah satu penyebabnya, dimana pendidikan yang tidak sesuai standar dapat menjadi hambatan seseorang memperoleh suatu pekerjaan yang layak (Domri & Ridwan, 2019).

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2022 Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen, menurun 0,17 persen poin terhadap September 2021 dan menurun 0,60 persen poin terhadap Maret 2021, jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang menurun 0,34 juta orang terhadap September 2021 dan menurun 1,38 juta orang terhadap Maret 2021 (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023). Sumatera Utara menduduki peringkat ke 18 dari 34 provinsi secara Nasional pada tahun 2021, dan Kabupaten Labuhanbatu menduduki peringkat 10 dari 33 jumlah masyarakat miskin terbanyak di kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 45.030 jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2023.)

Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari 9 kecamatan dengan 23 kelurahan dan 75 desa, dimana Kabupaten Labuhanbatu memiliki posisi yang cukup strategis yaitu daerah yang berada pada jalur lintas Sumatera dan berada pada persimpangan menuju provinsi Riau dan Sumatera Barat, yang menghubungkan pusat-pusat perkembangan wilayah di Sumatera dan Jawa serta mempunyai akses yang memadai ke luar negeri karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Posisi strategis tersebut membantu berjalannya perkembangan Kabupaten Labuhanbatu. Walaupun dinilai sebagai daerah yang terbelakang memiliki laju peningkatan yang baik akan tetapi memiliki permasalahan yang sama dengan kabupaten/kota lain dalam hal kependudukan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu, 2023).

Dinas sosial merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam melakukan tugas-tugas pemerintah bidang kesejahteraan sosial. Dinas Sosial memiliki tugas pokok mengelola urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, pembinaan kesejahteraan sosial dan pembinaan tenaga kerja. Selain itu Dinas Sosial merupakan salah satu organisasi daerah terkait yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap anak jalanan yang bekerja sama dengan instansi terkait serta lembaga swadaya masyarakat. Dinas sosial bertanggung jawab melaksanakan pembinaan terhadap anak jalanan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, mulai dari pendataan, kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat setempat, kemudian kegiatan pengawasan serta kegiatan patroli rutin. Maka dari itu perlu adanya upaya dalam membina anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhan Batu.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat permasalahan berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Labuhan Batu. Tabel berikut merupakan penyandang masalah sosial yang dialami oleh anak di Kabupaten Labuhan Batu

**Tabel 1. 1**

**Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2023**

No.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Anak Balita Terlantar	11	10	10
2.	Anak Terlantar	56	51	51
3.	Anak Jalanan	35	20	20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Anak dengan Kedisabilitas	75	62	63
5.	Anak Berhadapan Dengan Hukum	-	2	2
6.	Anak Korban Tindak Kekerasan	-	-	-
7.	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	5	5	5

Sumber: (Dinas Sosial Kabupaten Labuhan Batu, 2023.)

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa, tiap tahun anak yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial mengalami peningkatan tiap tahunnya yang mengakibatkan anak tersebut menjadi gelandangan, pengamen, dan pengemis. Meskipun ternilai sebagai kabupaten dengan laju perekonomian yang cukup baik serta memiliki pendapatan daerah yang cukup, akan tetapi memiliki permasalahan yang sama dengan sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia. Masalah tentang anak jalanan ini sudah menjadi agenda pemerintah dalam penanganannya. Sampai saat ini pun masalah ini belum sepenuhnya dapat diatasi, ditandai dengan meningkatnya jumlah anak jalanan yang berkeliaran di sekitaran sentral kabupaten.

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan pembinaan anak jalanan. Penelitian Ulya Kencana, Yuswalina, dan Eza Triyandhy Andriyansyah yang berjudul "Efektivitas Peraturan Daerah yang Berkesejahteraan Sosial di Kota Palembang: Studi Kasus Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Masa Pandemi Covid-19" hasil penelitian menunjukkan bahwa, belum efektifnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan Dan Pengemis di Kota Palembang. Peraturan belum berjalan secara maksimal. Faktor kendala di lapangan di mana kinerja aparat penegak hukum kurang maksimal dan kesejahteraan aparat penegak hukum (Kencana et al., 2021). Penelitian Khoirin, Heru Purnawan, dan Dian Anggraini yang berjudul "Analisis Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Di Ogan Ilir" hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pelaksanaan Program Pembinaan Dinas Sosial Terhadap Anak Jalanan di Kota Indralaya pada dasarnya adalah memberikan bantuan dalam hal pembinaan menanggulangi masalah anak jalanan yang pada akhirnya diarahkan kedalam bentuk pendataan dan pembinaan psikis (konseling) akan pentingnya pendidikan serta memfasilitasi pertemuan dengan keluarganya. Kualitas pembinaan anak jalanan selama ini masih rendah terkait kurangnya tindakan nyata dalam pelaksanaan program pembinaan anak jalanan (Khoirin et al., 2021). Penelitian A. M. Ian Setiawan, Abdul Mahsyar, dan Nuryanti Mustari yang berjudul "Pelaksanaan Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Makassar", hasil penelitian menunjukkan bahwa, Dinas Sosial Kota Makassar dalam pelaksanaan penanganan anak jalanan gelandangan dan pengemis di Kota Makassar yaitu melakukan pendataan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan dan melakukan kampanye dan sosialisasi (Setiawan et al., 2023). Penelitian Rita Pertiwi, Tubagus Muhammad Nasarudin, Andre Pebrian Perdana, dan Aditia Arief Firmanto yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Bandar Lampung" hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pelaksanaan Perda No. 03 Tahun 2010 tentang pembinaan jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung belum terlaksana secara maksimal (Pertiwi et al., 2021). Terakhir, penelitian Yohanes Kasian Hajon, Eri Yusnita Arvianti, dan Cahyo Sasmito yang berjudul "Implementasi Kebijakan Penanggulangan

Anak Jalanan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Polisi Pamong Praja Kota Malang” hasil penelitian menunjukkan bahwa, Implementasinya selama ini sudah cukup baik, walaupun dalam proses implementasinya di Kota Malang masih banyak kendala namun pemerintah berupaya sekuat tenaga untuk memberdayakan dan mengatasi keberadaan anak-anak yang merajalela dan tergeceh. di Kota Malang. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pencegahan penggulingan dan perataan yang dilakukan pemerintah Kota Malang (Kasian Hajon et al., 2023).

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Terdapat perbedaan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu, dimana lokasi penelitian yang dilakukan di Kabupaten Labuhan Batu. Teori yang digunakan oleh penulis menggunakan teori Upaya menurut Surayin yang terdiri dari empat dimensi yaitu, Upaya Preventif, Upaya Preservatif, Upaya Kuratif, dan Upaya Adaptasi (Surayin, 2001).

#### **1.5. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji serta mengetahui bagaimana upaya, mengetahui faktor penghambat, dan mengatasi faktor penghambat Dinas Sosial Kabupaten Labuhan Batu dalam memberikan pembinaan kepada anak jalanan.

### **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai sosial yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu kejadian atau fenomena dan kenyataan sosial. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang berdasar pada postpositivisme, yang dipakai untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2015).

Penulis mengumpulkan observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan apa yang dijelaskan Simangungsong (Simangungsong, 2017). Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 17 informan yang terdiri dari, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pegawai Kementerian Sosial, Pengurus Yayasan Panti Asuhan dan Anak Jalanan sebanyak sepuluh orang.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Upaya Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kabupaten Labuhanbatu**

##### **3.1.1. Upaya Preventif**

Upaya preventif mengandung makna sebagai langkah untuk mencegah terjadinya masalah yang berpotensi membahayakan, baik secara personal maupun global. Penulis kemudian menyusun indikator untuk mengukur efektivitas kegiatan perlindungan yang dilaksanakan, yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu, Ibu Wilda Siregar, pada 10 Januari 2024. Dalam wawancara tersebut, dijelaskan bahwa upaya pencegahan dilakukan melalui pendataan langsung oleh Dinas Sosial, bekerjasama dengan lembaga-lembaga sosial di tiap kecamatan. Data yang dikumpulkan mencakup

informasi demografis dan sosial-ekonomi yang digunakan sebagai acuan dalam pembinaan lebih lanjut. Kegiatan ini didukung oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bapak Djoeang Hasibuan, yang menyatakan bahwa dinas sosial dan Satpol PP rutin melaksanakan evaluasi dan kegiatan penjangkauan anak jalanan untuk pembinaan.

Selain wawancara, penulis juga melakukan observasi lapangan yang mengkonfirmasi adanya rencana kegiatan rapat evaluasi indikator kabupaten layak anak dan razia gabungan untuk menjaring anak jalanan serta individu bermasalah lainnya. Meskipun upaya pembinaan telah dilakukan, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa program ini belum efektif. Banyak anak jalanan yang kembali ke jalanan setelah pembinaan, yang disebabkan oleh kurangnya kemauan dari anak-anak tersebut untuk berubah dan tekanan ekonomi yang memaksa mereka mencari nafkah di jalanan. Kesimpulannya, meskipun ada upaya yang signifikan dari Dinas Sosial dan Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu dalam pembinaan anak jalanan, hasilnya belum optimal. Faktor internal dari anak-anak dan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi menjadi hambatan utama yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang lebih efektif dalam program pembinaan ini.

### **3.1.2 Upaya Preservatif**

Upaya preservatif bertujuan untuk memelihara atau mempertahankan kondisi yang sudah kondusif agar tidak memburuk. Perhatian serius dari pemerintah terhadap anak jalanan adalah krusial, namun tanggung jawab tersebut juga harus dibagi dengan orang tua yang memiliki kewajiban melindungi anak-anak mereka dari pekerjaan di usia dini. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk melindungi hak-hak anak jalanan. Dalam konteks ini, penulis menyusun indikator untuk mengukur efektivitas pemeliharaan kondisi yang dilakukan, dengan pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Bapak Arip Rahman, mengungkapkan bahwa karena Rumah Singgah untuk anak jalanan masih dalam pembangunan, upaya yang dilakukan adalah bekerja sama dengan Yayasan Panti Asuhan Muhammadiyah dan lembaga terkait untuk rehabilitasi anak jalanan. Rehabilitasi ini meliputi perbaikan mental dan fisik agar anak-anak tersebut tidak kembali ke jalanan. Hasil wawancara dengan Pegawai Kementerian di Dinas Sosial, Bapak Putra Pujiyanto, menegaskan bahwa kerjasama dengan Panti Asuhan Muhammadiyah memang berlangsung, tetapi efektivitasnya masih rendah karena anak-anak tetap kembali ke jalanan.

Pengurus Panti Asuhan Muhammadiyah mendukung pernyataan tersebut, menyebutkan bahwa mereka menyediakan tempat dan penceramah untuk membimbing mental dan perilaku anak-anak jalanan. Namun, wawancara dengan seorang anak jalanan menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan lingkungan yang buruk memaksa mereka kembali ke jalanan. Observasi penulis di lapangan menunjukkan bahwa rumah singgah di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu masih dalam masa pembangunan, sementara Panti Asuhan Muhammadiyah telah menyediakan fasilitas untuk pembinaan anak jalanan. Meskipun ada upaya perbaikan perilaku dan mental anak jalanan, efektivitasnya terbatas. Arahan dan motivasi yang diberikan belum memberikan dampak besar, karena anak-anak tersebut sering kembali ke jalanan setelah dipulangkan. Faktor lingkungan yang tidak kondusif dan kurangnya kemauan dari anak-anak untuk berubah menjadi hambatan utama dalam upaya rehabilitasi ini.

Kesimpulannya, meskipun ada upaya dari pemerintah dan lembaga terkait untuk merehabilitasi anak jalanan, hasilnya belum optimal. Efektivitas program rehabilitasi harus ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan intensif, termasuk memperbaiki kondisi lingkungan dan memberikan dukungan ekonomi yang lebih kuat bagi keluarga anak-anak tersebut.

### **3.1.3. Upaya Kuratif**

Upaya kuratif bertujuan untuk membimbing seseorang kembali ke jalur yang benar, terutama dari kondisi bermasalah menjadi individu yang mampu mengatasi masalahnya dan bebas dari masalah tersebut. Anak-anak, sebagai individu yang sedang tumbuh dan berkembang, memerlukan bimbingan yang baik untuk memastikan pertumbuhannya menuju arah yang benar. Selain itu, upaya kuratif juga bertujuan membangun kepercayaan diri agar anak-anak dapat bersosialisasi dan bermanfaat bagi lingkungannya. Berdasarkan tujuan ini, penulis menyusun indikator untuk mengukur efektivitas kegiatan pembinaan yang telah direncanakan dan dilaksanakan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait. Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Bapak Arip Rahman, mengungkapkan bahwa beberapa kegiatan pemberdayaan telah dilakukan untuk membimbing anak jalanan dan anak terlantar agar menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat. Kegiatan ini meliputi pelatihan menjahit, pelatihan komputer, dan merakit perangkat keras komputer, yang dilaksanakan dengan kerjasama Panti Asuhan Muhammadiyah dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Pegawai Kementerian di Dinas Sosial, Bapak Putra Pujiyanto, menambahkan bahwa selain memberikan nasihat, pelatihan-pelatihan tersebut diikuti dengan upaya untuk menempatkan anak-anak yang telah dilatih pada pihak-pihak yang bersedia mempekerjakan mereka. Namun, ada tantangan yang dihadapi, seperti ketidakbetahan anak-anak di tempat kerja yang menyebabkan mereka kembali ke jalanan. Observasi di Panti Asuhan Muhammadiyah mendukung pernyataan tersebut. Penulis melihat beberapa perangkat komputer dan alat jahit yang akan digunakan untuk pelatihan anak jalanan. Berdasarkan wawancara dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa faktor pengetahuan dan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap keberadaan anak jalanan. Meskipun daya tampung untuk kegiatan pelatihan belum maksimal dan ada anak-anak yang memilih kembali ke jalanan, kegiatan pemberdayaan dalam rangka peningkatan keterampilan bagi anak jalanan berjalan cukup efektif.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan fasilitas dan ketidakbetahan anak-anak setelah pelatihan, upaya kuratif yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan lembaga terkait telah menunjukkan hasil yang cukup positif. Peningkatan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan telah membantu banyak anak jalanan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk kehidupan yang lebih baik, meskipun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

### **3.1.4. Upaya Adaptasi**

Upaya adaptasi bertujuan untuk membantu terciptanya penyesuaian antara individu dan lingkungannya sehingga terjadi kesesuaian antara pribadi seseorang dengan lingkungannya. Berdasarkan tujuan tersebut, penulis menyusun indikator untuk mengukur efektivitas kegiatan adaptasi yang dilaksanakan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait. Wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu, Ibu Wilda Siregar, mengungkapkan bahwa anak jalanan sering tidur di pinggir jalan, depan ruko-ruko, atau taman kota,

meskipun beberapa memiliki tempat tinggal. Karena anggaran terbatas, upaya yang dilakukan adalah menasihati anak-anak jalanan agar tidak kembali ke jalan dan menghimbau orang tua mereka untuk mencegah anak-anak mereka turun ke jalanan lagi.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Bapak Arip Rahman, menambahkan bahwa keberadaan anak jalanan sering mengganggu ketertiban umum, misalnya dengan mengamen di persimpangan jalan yang menyebabkan kemacetan, merusak fasilitas umum, dan sering terlibat dalam perkelahian. Oleh karena itu, pihak Dinas Sosial bekerja sama dengan Satpol PP dan instansi terkait untuk menertibkan lingkungan tempat anak-anak jalanan berada. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bapak Djoeng Hasibuan, menjelaskan bahwa pihaknya rutin melakukan patroli razia untuk menjaring anak jalanan, pengemis, dan gelandangan. Namun, dalam pelaksanaan razia, sering ditemui hambatan dari preman dan oknum ormas yang menghalangi penertiban, sehingga memerlukan bantuan dari pihak kepolisian. Wawancara dengan seorang manusia silver mengkonfirmasi bahwa anak jalanan sering tidur di tempat-tempat terbuka dan menghadapi gangguan dari preman dan oknum ormas setempat yang meminta uang keamanan, sehingga membuat lingkungan tidak kondusif.

Observasi lapangan menunjukkan kehadiran preman dan oknum ormas di taman kota Labuhanbatu yang sering mengganggu ketertiban umum. Berdasarkan wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa upaya adaptasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial kurang efektif. Nasihat dan himbauan kepada anak jalanan dan orang tua mereka tidak cukup untuk mencegah anak-anak kembali ke jalanan. Keterbatasan anggaran membatasi kemampuan Dinas Sosial untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dukungan anggaran dan program pelatihan yang lebih komprehensif untuk membantu anak-anak jalanan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lebih kondusif dan mengurangi ketergantungan mereka pada kehidupan jalanan.

### **3.2. Faktor Penghambat Upaya Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan**

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi upaya Dinas Sosial dalam melaksanakan pemberdayaan anak jalanan di Kabupaten Labuhanbatu. Faktor-faktor ini dibagi menjadi dua jenis: faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal.

Faktor penghambat internal yang pertama adalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terbatas. Hasil observasi penulis di Dinas Sosial menunjukkan bahwa jumlah anggota tim penjangkauan sangat terbatas, hanya terdiri dari lima orang: satu kepala tim, satu pengemudi, satu anggota wanita, dan dua anggota pria yang berpatroli hingga sore hari di daerah Kabupaten Labuhanbatu. Dalam wawancara pada 10 Januari 2024, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Bapak Arip Rahman, SE, menyatakan bahwa tim ini bertindak langsung untuk menangani anak jalanan, gelandangan, dan orang gila, tetapi jumlah anggota yang terbatas menyebabkan upaya mereka kurang maksimal. Dukungan dari Ibu Martini Veanny Silalahi, S.Kep, Ners, JF. Penyuluh Sosial, menambahkan bahwa tim mereka di lapangan sangat kekurangan anggota, hanya beranggotakan 5-6 orang per tim, dan belum semua anggota mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menangani anak jalanan. Dari hasil observasi penulis, hampir 50% dari tim penjangkauan hanya lulusan SMA atau bukan sarjana sosial, dan belum mendapatkan pelatihan khusus untuk menangani anak jalanan,

yang menunjukkan bahwa kualitas tim belum sesuai dengan harapan. Faktor penghambat internal kedua adalah alokasi anggaran yang terbatas. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Bapak Arip Rahman, SE, menerangkan bahwa kegiatan pemberdayaan anak jalanan dilakukan secara terbatas karena keterbatasan anggaran. Akibatnya, kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan terbatas hanya dalam bentuk pembinaan, razia, maupun penertiban secara terbatas. Ibu Martini Veanny Silalahi menambahkan bahwa anggaran untuk pembinaan anak jalanan masih sangat kurang, sehingga banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan. Pelatihan terakhir dilakukan pada tahun 2021 dengan bantuan anggaran dari Kementerian Sosial. Bapak Putra Pujiyanto, S.Sos., Pegawai Kementerian Sosial yang ditempatkan di Dinas Sosial Labuhanbatu, mengatakan bahwa anggaran untuk pembinaan anak jalanan sangat terbatas, dan pihaknya sering mengajukan proposal untuk meminta bantuan anggaran dari UPT. Kemensos di provinsi.

Selain faktor penghambat internal, terdapat juga faktor penghambat eksternal. Salah satu faktor eksternal adalah lemahnya koordinasi antar pihak terkait. Bapak Ardiansyah Hasibuan, salah satu pekerja di tim penjangkauan, mengatakan bahwa program-program pemberdayaan dan pembinaan umumnya dilakukan secara mandiri, dan pelibatan instansi lain biasanya hanya dilakukan pada saat penertiban ODGJ dan gelandangan, atau pada saat pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang dilaksanakan dua kali setahun. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi terkait dalam pemberdayaan dan pembinaan anak jalanan masih sangat lemah. Faktor eksternal lainnya adalah rendahnya ekonomi dan dukungan dari orang tua atau wali. Dalam wawancara pada 13 Januari 2024, Ibu Endang, salah satu orang tua anak jalanan, mengatakan bahwa ia membiarkan anaknya mencari uang di jalanan karena kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Ia bekerja sebagai pengumpul barang rongsokan dan tidak memiliki pilihan lain selain membiarkan anaknya mencari uang di jalanan. Observasi penulis menunjukkan bahwa rata-rata orang tua dari anak jalanan ini bekerja sebagai pengemis, pengamen, atau pemulung, dan tidak memiliki pekerjaan yang layak. Sikap orang tua yang acuh dan ketidakmampuan mereka untuk memberikan dukungan yang memadai menyebabkan program pemberdayaan dan pembinaan anak jalanan di Kabupaten Labuhanbatu tidak berjalan secara aktif. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan keterlibatan orang tua menjadi penghambat eksternal yang signifikan dalam upaya pemberdayaan anak jalanan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terbatas serta alokasi anggaran yang rendah menjadi faktor penghambat internal utama dalam pelaksanaan pemberdayaan anak jalanan di Kabupaten Labuhanbatu. Selain itu, lemahnya koordinasi antar instansi terkait dan rendahnya ekonomi serta dukungan dari orang tua atau wali menjadi faktor penghambat eksternal yang turut mempengaruhi upaya pemberdayaan anak jalanan di daerah tersebut.

### **3.3. Usaha Mengatasi Faktor Penghambat**

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis, disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menghambat upaya pemberdayaan anak jalanan di Kabupaten Labuhanbatu telah diatasi melalui berbagai langkah tertentu yang sesuai dengan hasil evaluasi terhadap faktor-faktor penghambat tersebut. Penulis membagi upaya-upaya ini menjadi dua jenis, yaitu usaha internal dan usaha eksternal. Untuk usaha internal, langkah pertama yang diambil adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Wilda Siregar, ST.,

Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu, dijelaskan bahwa tim penjangkauan di Dinas Sosial sangat terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, Dinas Sosial berupaya mengatasi kekurangan ini dengan mengusulkan penambahan anggota kepada Bupati Labuhanbatu. Selain itu, mereka juga berupaya memberikan pelatihan kepada anggota tim agar lebih profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Langkah kedua dalam usaha internal adalah optimalisasi keuangan. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu penghambat utama pemberdayaan anak jalanan. Ibu Wilda Siregar menyatakan bahwa setiap tahun Dinas Sosial mengusulkan penambahan anggaran, meskipun belum terpenuhi. Mereka mengoptimalkan anggaran yang tersedia dengan memprioritaskan kegiatan yang paling penting. Bapak Putra Pujiyanto, S.Sos., Pegawai Kementerian Sosial yang ditempatkan di Dinas Sosial Labuhanbatu, juga menekankan pentingnya mengusulkan penambahan anggaran untuk mengatasi keterbatasan ini.

Untuk usaha eksternal, langkah pertama yang diambil adalah penguatan koordinasi antar pihak terkait. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Bapak Arip Rahman, SE, dijelaskan bahwa dalam setiap penertiban, Dinas Sosial mengajak instansi terkait seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk berpartisipasi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dalam upaya pemberdayaan anak jalanan. Meskipun demikian, pengamatan penulis menunjukkan bahwa upaya ini belum sepenuhnya signifikan. Langkah kedua dalam usaha eksternal adalah sosialisasi dan penyuluhan kepada orang tua atau wali anak jalanan serta anak jalanan itu sendiri. Meskipun upaya ini masih terbatas, Bapak Arip Rahman menjelaskan bahwa ketika anak jalanan ditangkap dan dibawa untuk pembinaan, tim juga memberikan edukasi kepada orang tua mereka tentang pentingnya mencegah anak turun ke jalanan, meskipun seringkali dilakukan karena keterbatasan ekonomi.

Secara keseluruhan, Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan berbagai usaha untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam pemberdayaan anak jalanan. Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta optimalisasi anggaran merupakan langkah penting dalam usaha internal. Sedangkan penguatan koordinasi antar instansi terkait dan penyuluhan kepada orang tua atau wali anak jalanan merupakan langkah dalam usaha eksternal. Meskipun masih terdapat berbagai kendala, Dinas Sosial terus berupaya meningkatkan efektivitas program pemberdayaan anak jalanan di Kabupaten Labuhanbatu.

#### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Selama melaksanakan penelitian penulis telah menemukan yang bisa dijadikan diskusi terhadap perbandingan terhadap penelitian terdahulu, dimana temuan penelitian penulis adalah pelaksanaan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu belum berjalan dan terselenggara dengan baik dan maksimal. Keterbatasan anggaran dan jumlah pekerja sosial yang sangat minim adalah faktor utamanya. Hal ini sejalan dengan penelitian Ulya Kencana, Yuswalina, dan Eza Triyandhy Andriyansyah yang menunjukkan bahwa, belum efektifnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan Dan Pengemis di Kota Palembang. Peraturan belum berjalan secara maksimal (Kencana et al., 2021). Kemudian penelitian, Rita Pertiwi, Tubagus Muhammad Nasarudin, Andre Pebrian Perdana, dan Aditia Arief Firmanto yang menunjukkan bahwa, Pelaksanaan Perda No. 03 Tahun 2010 tentang pembinaan jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung belum terlaksana secara maksimal (Pertiwi et al., 2021).

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa, Dalam upaya preventif, Dinas Sosial melakukan pendataan langsung dan bekerja sama dengan Satpol PP untuk pemantauan dan pengawasan anak jalanan. Dalam dimensi preservatif, mereka bekerja sama dengan yayasan panti asuhan untuk rehabilitasi anak jalanan, memperbaiki perilaku mereka secara mental dan fisik. Upaya kuratif melibatkan pelatihan seperti kursus menjahit dan komputer. Untuk dimensi adaptasi, Dinas Sosial dan Satpol-PP melaksanakan patroli razia untuk menjaga ketertiban umum. Penulis juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat dalam upaya pemberdayaan anak jalanan, yaitu terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, keterbatasan alokasi anggaran, lemahnya koordinasi dengan pihak terkait, serta lemahnya ekonomi dan partisipasi orang tua atau wali anak jalanan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Dinas Sosial melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, optimalisasi anggaran, penguatan koordinasi antar pihak terkait, serta sosialisasi dan penyuluhan kepada orang tua atau wali anak jalanan. Penulis memberikan beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas upaya pemberdayaan anak jalanan, seperti meminta Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk mengevaluasi dan meningkatkan anggaran, mendorong kepala dinas terkait untuk lebih aktif dan peduli, serta mensosialisasikan pentingnya melindungi hak-hak anak jalanan kepada masyarakat, terutama orang tua atau wali.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pembinaan anak jalanan agar dapat memberikan masukan yang lebih luas.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhan Batu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, I. F. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.*
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). Profil kemiskinan di indonesia september 2023. *Berita Resmi Statistik*, 01(05), 1–16.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2023). Retrieved October 10, 2023, from <https://sumut.bps.go.id/indicator/23/115/1/garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu. (2023). *Kabupaten Labuhan Batu Dalam Angka Tahun 2023.*
- Dinas Sosial Kabupaten Labuhan Batu. (2023). Rantau Prapat
- Domri, & Ridwan. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Journal of Administrative and Social Science*, 5(1), 205–219.

<https://doi.org/10.55606/jass.v5i1.929>

- Kasian Hajon, Y., Yusnita Arvianti, E., Sasmito, C., Tribhuwana Tunggadewi Malang, U., & Author, C. (2023). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Polisi Pamong Praja Kota Malang. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 3(3), 408–415.
- Kencana, U., Yuswalina, & Eza, T. (2021). Efektivitas Peraturan Daerah yang Berkesejahteraan Sosial di Kota Palembang: Studi Kasus Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Masa Pandemi Covid-19. *Simbur Cahaya*, 27(2), 70–97. <https://doi.org/10.28946/sc.v27i2.1039>
- Khoirin, K., Purnawan, H., & Anggraini, D. (2021). Analisis Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Di Ogan Ilir. *Jurnal Publisitas*, 7(2), 140–148. <https://doi.org/10.37858/publisitas.v7i2.53>
- Lase, M. S., Panjaitan, M., & Lumbanraja, R. (2023). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Dalam Rangka Penanganan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Medan. *Governance : Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 9(4), 100–104.
- Najidah, N., & Lestari, H. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 69–87.
- Pertiwi, R., Nasarudin, T. M., Perdana, A. P., & Firmanto, A. A. (2021). Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Bandar Lampung. 0, 1–23.
- Setiawan, A. M. I., Mahsyar, A., & Mustari, N. (2023). Pelaksanaan Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Makassar. *Journal Unismuh*, 4, 1033–1147.
- Simangunsong, F. (2017). *Metode Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Surayin. (2001). *Kamus Umum Bahasa Indonesia Analisis*. Yrama Widya.